



SIGIT ROCHADI

Dualitas dalam Gerakan Buruh di Indonesia

RESUME: Studi tentang gerakan buruh di Indonesia terlalu dikotomis: di satu pihak menggunakan cara pandang politik, baik gerakan buruh sebagai gerakan politik maupun relasi gerakan buruh dengan partai politik. Di sisi lain, gerakan buruh diposisikan sebagai gerakan ekonomi. Akhir-akhir ini, bangkit kembali cara pandang politik dalam memahami gerakan buruh. Cara pandang semacam itu dipengaruhi oleh teori-teori dari dunia Barat dan Eropa Timur. Teori klasik dari Barat memang melihat gerakan buruh sebagai upaya untuk memelihara dan meningkatkan kesejahteraan buruh. Teori dari Barat ada juga yang menyatakan bahwa gerakan buruh adalah untuk mencapai tujuan ganda, yaitu optimalisasi upah dan perlindungan pekerjaan. Sebaliknya, teori-teori yang berkembang di Eropa Timur banyak dipengaruhi oleh pandangan bahwa pekerja itu sebagai komoditas; dan majikan yang mempekerjakan mereka telah melakukan eksploitasi dalam berbagai bentuk untuk mendapatkan keuntungan berlipat. Ada juga pandangan bahwa gerakan buruh adalah sebagai kekuatan transformatif secara sosial dan politik. Artikel ini menjelaskan gerakan buruh di Indonesia dengan menggunakan konsep dualitas. Menurut penulis, gerakan buruh di Indonesia paling tepat dipahami dengan konsep dualitas, bukan dengan konsep dualisme maupun dualistik. Dengan menggunakan metode analisis data sekunder, penelitian ini menyimpulkan bahwa tumbuh dan berkembangnya dualitas dalam gerakan buruh di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari sejarah kelahiran gerakan buruh, relasi yang khas antara buruh dan negara, pluralitas masyarakat Indonesia, serta industrialisasi yang meluas dan kurang melakukan pendalaman. Menguatnya dualitas dalam gerakan buruh pasca pemerintahan Orde Baru juga disumbang oleh kegagalan pemerintah Soeharto dalam memaksakan gerakan ekonomi bagi para buruh.

KATA KUNCI: Dualitas; Gerakan Buruh; Gerakan Politik; Gerakan Ekonomi; Industrialisasi.

ABSTRACT: "The Duality of Labor Movement in Indonesia". The study of the labor movement in Indonesia are dichotomous: on the one hand using a political point, both the labor movement as a political movement nor the relation of the labor movement with a political party. On the other hand, the labor movement is positioned as an economic movement. Lately, resurgent political perspective in understanding the labor movement. Such a perspective is influenced by the theories of the West and the Eastern Europe. Classical theory of the West did see the labor movement as an effort to maintain and improve the welfare of workers. Theory of the West, there is also stated that the labor movement is to achieve the dual purpose of optimizing wage and job protection. Conversely, theories that developed in Eastern Europe is heavily influenced by the view that the worker as a commodity; and employers who hire them have done in various forms of exploitation for profit doubled. There is also a view that the labor movement is as transformative power of socially and politically. This article explains the labor movement in Indonesia by using duality concept. According to the writer, labor movement in Indonesia is best understood by the concept of duality, not dualism nor dualistic. By using secondary data analysis method, this study concludes that the emerging and development of the duality in the labor movement in Indonesia formed by momentum birth of the labor movement, the typical relationship between the workers and the state, a plurality of Indonesian society, and the widespread industrialization and the lack of deepening. The duality strengthening during the labor movement after the New Order government era, also formed by Soeharto government's failure to impose economic movement for workers.

KEY WORD: Duality; Labor Movement; Political Movement; Economic Movement; Industrialization.

About the Author: Dr. Sigit Rochadi adalah Dosen FISIP UNAS (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nasional), Jalan Sawo Manila, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550, Indonesia. Korespondensi penulis adalah: sigitrochadi@yahoo.com dan siroabadi@gmail.com

How to cite this article? Rochadi, Sigit. (2016). "Dualitas dalam Gerakan Buruh di Indonesia" in *SOSIOHUMANIKA: Jurnal Pendidikan Sains Sosial dan Kemanusiaan*, Vol.9(1) May, pp.89-104. Bandung, Indonesia: Minda Masagi Press and UPI Bandung, ISSN 1979-0112.

Chronicle of the article: Accepted (April 29, 2015); Revised (February 15, 2016); and Published (May 30, 2016).

PENDAHULUAN

Studi tentang gerakan buruh di Indonesia terlalu dikotomis: di satu pihak menggunakan cara pandang politik, baik gerakan buruh sebagai gerakan politik maupun relasi gerakan buruh dengan partai politik. Di sisi lain, khususnya di era Orde Baru (1966-1998), gerakan buruh diposisikan sebagai gerakan ekonomi. Pada pasca Orde Baru (1998 – sekarang), bangkit kembali cara pandang politik.

Studi yang dilakukan oleh Benny Hari Juliawan (2011) menunjukkan kemampuan gerakan dalam melakukan politik jalanan atau *street-level politics*. Keberhasilan buruh menduduki tempat-tempat publik, seperti jalan dan bangunan, menunjukkan militansi dan koordinasi gerakan yang tinggi (Juliawan, 2011). Sebaliknya, salah seorang tokoh buruh penentang Presiden Soeharto, yakni Rekson Silaban (2011), berpendapat bahwa gerakan politik dan radikalisasi terjadi karena tidak ada kebebasan. Jika buruh diberi kebebasan membangun gerakan, maka akan fokus pada gerakan ekonomi. Ia mendorong gerakan buruh agar fokus pada gerakan ekonomi dan menyerahkan persoalan politik pada partai buruh (Silaban, 2011).

Penelitian Michele Ford (2014), di kawasan industri Batam, Kepulauan Riau, Indonesia, memberi harapan akan fungsi yang lebih efektif tentang serikat buruh lokal. Jika para elite nasional gagal menghadirkan wakil buruh dalam PEMILU (Pemilihan Umum) tahun 2004 dan 2009, maka aktivitas serikat buruh lokal banyak belajar dari kegagalan mereka dan memperkuat gerakan untuk kepentingan jangka panjang (Ford, 2014).

Demikian pula studi yang dilakukan oleh Kosuke Mizuno (2014), yang menguji teori F. Deyo (1989), bahwa kelemahan gerakan buruh di Asia Tenggara karena dominasi perempuan muda dalam angkatan kerja dan penggunaan hubungan *paternalistik* dalam birokrasi oleh pengusaha untuk mengontrol buruh. Riset Kosuke Mizuno ini menyimpulkan bahwa teori F. Deyo tidak dapat diterapkan untuk kasus Indonesia. Di negeri ini, hierarki perusahaan, penggunaan

gangster oleh pengusaha, dan buruknya perilaku birokrasi mencerminkan kelemahan gerakan buruh yang sesungguhnya (*cf* Deyo, 1989; dan Mizuno, 2014).

Cara pandang semacam itu dipengaruhi oleh teori-teori Barat dan Eropa Timur. Teori klasik dari Sidney Webb & Beatrice Webb (1920), misalnya, melihat gerakan buruh sebagai upaya untuk memelihara dan meningkatkan kesejahteraan buruh (Webb & Webb, 1920). Tidak beranjak jauh dari perspektif itu, Selig Perlman (1928) menyatakan bahwa tergabungnya para buruh dalam suatu gerakan bertujuan untuk mengontrol pekerjaan atau untuk mempertahankan pekerjaan itu sendiri (Perlman, 1928). John Dunlop (1944), kemudian, menggabungkan dua teori di atas ketika melakukan penelitian di beberapa industri manufaktur menjelang Perang Dunia II (1939-1945). Baginya, gerakan buruh untuk mencapai tujuan ganda, yaitu optimalisasi upah dan perlindungan pekerjaan (Dunlop, 1944).

Sebaliknya, teori-teori yang berkembang di Eropa Timur banyak dipengaruhi oleh Karl Marx (1990), yang memandang pekerja sebagai komoditas; dan majikan yang mempekerjakan mereka melakukan eksploitasi dalam berbagai bentuk untuk mendapatkan keuntungan berlipat. Pengikut Karl Marx, Vladimir Lenin (1902) memandang bahwa gerakan buruh sebagai kekuatan transformatif. Cara pandang ini mengikuti para sindikalis lainnya yang percaya akan tindakan langsung dari bawah menuju tangga manajemen dan mengontrol keamanan buruh (Lenin, 1902).

Dalam kondisi seperti ini, kekuatan buruh juga berperan sebagai transmisi antara buruh dan partai politik. Clark Kerr dan para koleganya, pada tahun 1960, telah memprediksi bahwa suatu saat dua model ini akan bertemu, meskipun mereka tidak merumuskan model pertemuan tersebut (Kerr *et al.*, 1960).

Tesis dalam artikel ini adalah gerakan buruh di Indonesia paling tepat dipahami sebagai gerakan dualitas. Berbeda dengan teori Salomon B. Levine (1963) tentang gerakan buruh *dualisme* atau *dualism labor*

movement; dan teori H.W. Singer (1970) tentang gerakan buruh dualistik atau *dualistic labour movement*, yang mendikotomi gerakan buruh Pusat - Daerah dan gerakan buruh Desa - Kota (Levine, 1963; dan Singer, 1970), penulis menawarkan konsep dualitas atau *duality* untuk memahami gerakan buruh di Indonesia.

Penggunaan konsep "dualitas" ini merujuk kepada Anthony Giddens (2003), yang menolak pertentangan pelaku dengan struktur dalam menjelaskan fenomena sosial. Bagi Anthony Giddens, pelaku tidak dilawankan dengan struktur, melainkan suatu relasi yang dualitas (Giddens, 2003). Model penjelasan yang memandang tindakan sosial dan struktur sebagai suatu kontinum digunakan di sini dengan sedikit modifikasi.

Intinya adalah bahwa gerakan buruh di Indonesia tidak mengikuti pola Eropa Timur yang bertujuan melakukan gerakan politik, baik melalui aliansi dengan partai politik atau membentuk partai politik untuk merebut kekuasaan; juga bukan mengikuti pola Amerika Serikat, yang mengejar tujuan-tujuan ekonomi. Gerakan buruh di Indonesia, sejak kelahirannya, mengejar tujuan politik dan ekonomi sekaligus. Untuk itu, akan dikemukakan berturut-turut mengenai kepeloporan gerakan buruh dalam gerakan sosial, tarik-ulur gerakan sosial-ekonomi dan gerakan sosial politik, serta penegasan dualitas dalam gerakan buruh di Indonesia.

BURUH SEBAGAI PELOPOR GERAKAN SOSIAL

Gerakan buruh merupakan pelopor gerakan sosial di Indonesia. Serikat buruh kali pertama lahir dari kaum pendidik, pada tahun 1897, dengan nama NIOG (*Nederlansch Indisch Ordewijzers Genootschap* atau Paguyuban Pendidik Hindia Belanda). Serikat ini lebih merupakan wahana komunikasi para pendidik Belanda dan menolak orang Indonesia asli (pribumi) menjadi anggota, sehingga tidak memiliki makna pergerakan. Demikian pula serikat-serikat buruh, seperti Serikat Asisten Perkebunan di Deli, Sumatera, pada tahun

1895; *Suikerbond* (Perkumpulan Buruh Gula) pada tahun 1906; *Cultuurbond* (Perkumpulan Buruh Perkebunan) pada tahun 1907; dan *Handelsbond* (Perkumpulan Buruh Perdagangan) pada tahun 1909 (*cf* Sandra, 1961:7; dan Breman, 1997:85).

Perkumpulan yang berdiri selain bias etnik, juga lebih merupakan perkumpulan kelas menengah perkotaan. Di samping itu, belum terbangun bentuk organisasi modern. Memang gerakan itu dibentuk di lapangan pekerjaan, seperti perkebunan dan pendidikan, tetapi ikatan yang mempersatukan mereka bukan pekerjaan itu sendiri, melainkan ras. Clifford Geertz (1988) menyebutnya *primordial sentiment*, suatu ikatan yang didasarkan perasaan yang melekat padanya sejak ia lahir (Geertz, 1988). Ikatan semacam itu bukan hanya fenomena khas masyarakat negara berkembang, tetapi juga menjangkiti orang-orang Eropa, seperti yang terjadi di Afrika Selatan dan sikap *under estimate* mereka terhadap penduduk di negeri jajahan.

Menurut pemikiran Peter Burke (2003), gerakan sosial dapat dibedakan orientasinya, yaitu apakah gerakan tersebut untuk memulai suatu proses perubahan atau sekedar reaksi atas suatu perubahan yang sedang terjadi. Dalam kedua kategori itu, gerakan sosial bukan sekedar perilaku kolektif, tetapi yang terpenting harus mengandung tantangan kolektif atau *collective challenge* (Burke, 2003:135). Gerakan reformasi, gerakan alternatif, gerakan sosial penyelamatan, apalagi revolusi, termasuk dalam kategori gerakan sosial. Seperti dikemukakan oleh Sydney Tarrow (1996), sebagai berikut:

Movements, I will argue, are better defined as collective challenges by people with common purposes and solidarity in sustained interaction with elite, opponents, and authorities (Tarrow, 1996:4).

Terjemahan:

Gerakan-gerakan itu, saya berpendapat, lebih baik didefinisikan sebagai tantangan-tantangan kolektif oleh rakyat sebagai tujuan bersama dan solidaritas dalam menjaga interaksi dengan golongan elite, pihak lawan, dan penguasa.

Dengan demikian, perkumpulan yang tidak diarahkan kepada tantangan kolektif atau *collective challenge*, terutama kepada elite dan pemegang kekuasaan, bukan gerakan sosial. Seperti arisan, protes, kerusuhan, dan pengajian adalah perilaku kolektif, tetapi jelas bukan gerakan sosial karena tidak mengandung tantangan kolektif, apalagi yang diarahkan kepada pihak elite. Dalam perkumpulan semacam itu, mungkin terdapat tujuan bersama dan solidaritas, tetapi bukan gerakan.

Dengan mengikuti konsep Sydney Tarrow (1996) di atas, sampai tahun 1913, di Indonesia tidak terdapat gerakan sosial. Meskipun ditemukan banyak perkumpulan atau *bond* dalam bahasa Belanda, seperti BO (Boedi Oetomo), SI (Sarekat Islam), IP (*Indische Patij*), Sarekat Percetakan, Sarekat Pegawai Pabrik, serta serikat-serikat kecil di berbagai kota, belum tumbuh perlawanan untuk mengubah kondisi sosial-ekonomi dan politik.

Kepeloporan dalam gerakan sosial disemai oleh VSTP (*Vereeniging van Spooren en Tramweg Personeel* atau Perhimpunan Pekerja Trem dan Kereta Api), yang didirikan oleh 63 orang buruh Eropa pada tanggal 14 Nopember 1908 di Semarang, Jawa Tengah (Ingleson, 2004:37). Berbeda dengan pendahulunya, *Staatsspoor Bond* (Serikat Kereta Api Pemerintah) dan beberapa serikat lainnya yang menolak keanggotaan pribumi, VSTP membuka kesempatan orang-orang Indonesia sebagai anggota yang memiliki hak suara penuh. Meskipun demikian, perjalanan hak politik ini tidak mulus. Sejak berdirinya, VSTP dihadapkan pada persoalan apakah mempertahankan keanggotaan eksklusif Eropa atau menjadikannya sebagai gerakan massa. Perdebatan tentang identitas gerakan ini menghabiskan waktu lima tahun lebih. Dalam Rapat Pengurus, di bulan Oktober 1913, Pengurus Eksekutif Pusat menyetujui masuknya orang-orang Indonesia sebagai anggota VSTP; dan pada Rapat Umum VSTP bulan Februari 1914, di Semarang, disetujui 3 posisi Pengurus Eksekutif Pusat untuk pribumi dan 4 posisi untuk orang Belanda (Ingleson, 2004).

Perkembangan anggota VSTP melonjak tajam, demikian pula komposisi pengurus dan latar belakang anggota. Jika pada tahun 1913, VSTP hanya memiliki 1,242 anggota yang setengah di antaranya orang Indonesia, maka pada tahun 1915, meningkat menjadi 2,292 anggota dengan 63 persen di antaranya orang Indonesia (Ingleson, 2004:41). Terjadinya krisis ekonomi dunia tahun 1918 dan pemogokan buruh di sektor pelabuhan, kereta api, perkebunan, pegadaian, dan percetakan di berbagai kota, terutama di Semarang dan Solo pada tahun 1918-1920, menjadi salah satu penyebab eksodus pekerja Belanda meninggalkan serikat buruh. Para buruh asal Belanda menolak pemogokan dan perlawanan terhadap majikan dan pemerintah kolonial. Inilah cikal-bakal kegagalan pembentukan kelas buruh di Indonesia. Fakta ini membuktikan bahwa faktor kultural, utamanya ras dan etnik, menjadi hambatan serius terbangunnya kesadaran kelas.

Awal tahun 1900-an, merupakan tonggak penting dalam studi gerakan sosial di Indonesia. Bangkitnya gerakan sosial, bersamaan dengan gerakan nasional, adalah dalam rangka melawan kolonialisme. Paling tidak ada empat kekuatan penting yang menandai dinamika gerakan sosial di Jawa pada awal tahun 1900-an ini, yaitu:

Pertama, kepemimpinan yang dipegang oleh tokoh agama Islam, jurnalis, dan *priyayi* (bangsawan Jawa) telah menarik dukungan massa yang sangat besar. Sekitar 300,000 orang aktif dalam pergerakan sosial pada periode tersebut. Ketiga elemen sosial tersebut merupakan elite pada masa itu dan keterpaduannya telah menjadi kekuatan perubahan sosial yang sangat besar. Tokoh agama Islam, misalnya, memberi legitimasi moral bahwa gerakan sosial sesuai dengan ajaran agama dan tindakan menolak feodalisme, kolonialisme, dan imperialisme sesuai pula dengan ajaran Islam. Kalangan jurnalis juga menjadi juru bicara terdepan melalui media massa. Inilah unsur penting dalam gerakan sosial modern.

Meskipun 90 persen penduduk Indonesia pada waktu itu masih buta huruf, digunakannya media massa menandai

modernitas dalam gerakan. Melalui media massa, terutama koran dan majalah mingguan, ide-ide penting disebarluaskan. Melalui perkumpulan-perkumpulan kecil di perkampungan, dimana terdapat satu atau dua orang yang bisa membaca, berita di media massa dapat menyebar. Masuknya kaum *priyayi*, yang identik dengan kemapanan, menambah kekuatan tersendiri. Para petani dan buruh yang umumnya bekerja pada kaum *priyayi*, tertarik ikut gerakan karena pemimpinnya dari kaum *priyayi*. Masuknya kaum bangsawan Jawa ini memberikan legitimasi sosial dan memperkuat sentimen pribumi untuk semakin mempertegas perlawanan sosial terhadap kekuatan asing.

Kedua, gerakan sosial merupakan tangga sosial yang menopang mobilitas sosial secara vertikal atau *social climbing*. Berpartisipasi dalam gerakan berarti terlibat dalam pertemuan, rapat-rapat, dan *vergadering* (rapat umum di lapangan), yang merupakan wahana buruh dan petani untuk aktualisasi diri. Tangga sosial yang tersedia di era kolonial sangat terbatas, apalagi struktur masyarakat feodal masih kuat mencengkeram. Hanya tersedia sekolah/ pendidikan untuk mencapai jenjang lebih tinggi. Ketatnya pembatasan peserta didik waktu itu menjadikan buruh dan petani tidak mungkin menikmati pendidikan dan menaiki tangga sosial.

Oleh karena itu, berpartisipasi dalam gerakan sosial menjadi pilihan tindakan yang logis. Tindakan sosial semacam ini bukan tanpa resiko, oleh pemerintah kolonial dan majikan diperlakukan sebagai musuh yang sewaktu-waktu dapat diberhentikan dari pekerjaan, ditangkap, dan ditahan tanpa proses hukum. Meskipun demikian, angka partisipasi buruh dan petani terhadap gerakan sosial terus meningkat. Sampai tahun 1920, sudah ada 22 serikat buruh yang mewakili 72,000 buruh (Shiraishi, 1997:301). Angka ini jika dibandingkan dengan hasil Sensus Penduduk tahun 1930 merupakan 30 persen dari penduduk usia kerja, sebuah prestasi yang belum pernah dicapai oleh negara berkembang manapun, termasuk di era

industrialisasi.

Ketiga, kebangkitan ideologi nasionalisme yang secara tegas membedakan dengan feodalisme, imperialisme, dan kolonialisme. Arti penting ideologi ini bagi gerakan buruh dan petani adalah menghubungkan langsung dengan negara. Proses perbesaran skala (*magnitude*) ini berjalan sangat cepat dari masyarakat yang bersuku-suku primordial, dengan sekat agama dan kepercayaan, ke masyarakat nasional. Untuk pertama kalinya, kaum buruh dan petani yang telah lama dalam cengkeraman feodalisme (buruh sebagai petani penggarap yang tidak memiliki posisi tawar dalam proses produksi) berhubungan langsung dengan negara.

Meskipun terjadi konflik tajam antara Islam dengan Komunisme, tetapi berhasil diredam oleh para pemimpin dengan ideologi nasionalisme yang diikuti oleh Sumpah Pemuda pada tahun 1928, *Bhinneka Tunggal Ika* (walaupun berbeda-beda tapi satu juga), dan kemudian *Pancasila* (lima dasar negara-kebangsaan). Meskipun demikian, sangat sukar mengikis ideologi tersebut dalam gerakan buruh. Sepanjang sejarah, selalu muncul gerakan buruh berasas Islam, Sosialisme, Komunisme, dan Primordialisme atau kedaerahan. Sistem politik liberal, seperti yang terjadi pada tahun 1949-1957 dan pasca Orde Baru (1998 - sekarang), merupakan arena subur bagi gerakan sosial yang mengusung kembali berbagai ideologi tersebut.

Keempat, kebutuhan perilaku kolektif akan identitas kolektif. Puluhan tahun di bawah cengkeraman feodalisme dan kemudian kolonialisme, para petani dan buruh merupakan lapisan bawah dalam struktur masyarakat. Mereka tidak memiliki daya tawar, kecuali menuruti perintah para tuan tanah, mandor (*sinder*), tuan kebun, dan pengawas di pabrik. Upah dan kondisi kerja apapun mereka terima tanpa menanyakan perhitungan, termasuk jam kerja yang panjang.

Buruh sebagai profesi baru di luar sektor pertanian menarik ribuan penduduk desa yang sedang dilanda krisis akibat ditutupnya tanah-tanah pertanian.

Meningkatnya jumlah buruh di perkotaan, dan interaksi yang intens antar mereka dengan mengangkat isu-isu pekerjaan, membuatnya sadar bahwa telah berlangsung eksploitasi terhadap mereka. Mereka mulai menemukan identitas kolektif sebagai kelompok tertekan dan mulai membangun solidaritas berdasarkan lapangan pekerjaan. Terdapat serikat buruh pabrik, serikat buruh pelabuhan, serikat buruh pegadaian, serikat buruh kereta api, serikat buruh percetakan, dan sebagainya. Inilah ikatan sosial baru yang coba dibangun untuk menggantikan kesukuan, agama, dan kedaerahan.

Pada tahun 1910-an, Henk Sneevliet, seorang tokoh sosialis Belanda yang datang ke Indonesia, menyerukan dihilangkannya perbedaan ras, agama, dan kesukuan dalam membangun gerakan buruh. Untuk sementara, seruannya diikuti oleh para buruh yang mulai terpesona dengan ideologi Sosialisme. Ideologi ini menjanjikan kesetaraan, kesejahteraan, ketertiban, dan kemajuan di bawah kepemimpinan negara yang kuat. Pergeseran solidaritas mekanis ke organis, *a la* Emile Durkheim (dalam Layendecker, 1983; dan Henselin, 2006), dimaksudkan untuk membangun kesadaran buruh. Sambutan luar biasa para buruh ini tidak terlepas dari kuatnya dasar ideologi, seperti musyawarah, mufakat, dan gotong-royong, yang telah menjadi tradisi masyarakat Indonesia (Mintz, 2002:15).

Tetapi, kemapanan pekerja Belanda dengan berbagai hak istimewanya, dan pekerja Cina dengan perlakuan khususnya, telah mengacaukan pemikiran Henk Sneevliet. Mobilitas sosial vertikal buruh Indonesia dihambat oleh garis ras. Posisi managerial, baik di perusahaan swasta maupun di pemerintahan, hanya bisa diduduki oleh orang-orang Belanda, dan jelas ini membangkitkan kecemburuan sosial. Apalagi upah pekerja pribumi hanya 0.75 persen saja bila dibandingkan dengan pekerja Cina. Kondisi ini telah membangkitkan pemogokan yang sporadis dari tahun 1910 sampai 1914. Di sini sentimen rasial, persemaian ideologi nasionalisme, dan ketimpangan sosial menemukan sosok yang sama, yaitu anti

kolonialisme (Shiraishi, 1997).

Kepeloporan serikat buruh dalam gerakan sosial tidak terlepas dari mobilitas psikis, meminjam konsep dari Daniel Lerner (1983), yang mereka alami setelah pindah ke kota. Buruh sebagai golongan baru dalam masyarakat pra-kapitalis merupakan lapisan bawah pertama yang mengalami mobilitas psikis (Lerner, 1983). Sebagai kelompok fungsional baru, para buruh berhasil membebaskan diri dari pengaruh hubungan *patron-client* dengan majikan yang sebagian besar orang-orang Eropa, sehingga lebih mampu menjaga jarak dan melakukan kritik.

Sementara itu, petani yang membangun hubungan dengan kaum feodal, puluhan tahun di tempat yang relatif tetap, sukar menghindari dari pengaruh *traditional authority*, menurut konsep Karl D. Jackson (1990), sehingga memiliki hubungan ketergantungan (Jackson, 1990). Buruh telah mampu membayangkan peran sosial yang lebih tinggi, sehingga berani melakukan perlawanan terbuka; sebaliknya petani, seperti temuan James C. Scott (2000), cenderung melakukan perlawanan terselubung atau *everyday form resistance*, seperti melakukan pencurian, pura-pura patuh, dan sabotase (Scott, 2000).

Relasinya dengan kaum terdidik, orang-orang Eropa, bangsawan, dan pekerja profesional, seperti jurnalis, pengacara, guru, dan pegawai pemerintah, menaikkan prestise buruh di era transisi ke kapitalisme ini (Rochadi, 2009b:12). Faktor terakhir ini juga telah menarik semakin banyak petani penggarap menjadi buruh. Selain itu, luasnya basis sosial gerakan buruh membuatnya inklusif, bersedia menerima kepemimpinan dari luar, seperti jurnalis, pengacara, dan guru. Di sinilah salah satu perbedaan penting gerakan buruh di Indonesia dibandingkan di negara industri.

Watak pluralisme masyarakat tidak bisa menghindari fenomena ini. Berbeda dengan corak kapitalisme Eropa, yang dimotori oleh manufaktur swasta, embrio kapitalisme Indonesia adalah sektor perkebunan milik negara. Dalam merkantilisme dan etatisme yang diperlihatkan oleh VOC (*Vereenigde Oost-Indische Compagnie* atau

Persatuan Perusahaan Dagang Hindia Belanda) kemudian menular ke perusahaan-perusahaan pegadaian, pelayaran, dan transportasi hingga masa Indonesia modern, gerakan buruh utamanya bukan tertuju kepada pengusaha swasta seperti di Eropa atau Amerika Serikat, melainkan kepada negara. Kenyataan ini merupakan penanda lain dari gerakan buruh di Indonesia. Kegagalan memahami akar gerakan buruh ini akan menyebabkan kegagalan dalam menjelaskan konflik-konflik yang berbasis material, khususnya yang melibatkan kaum buruh.

BURUH SEBAGAI GERAKAN POLITIK

Gerakan buruh di Indonesia, sejak kelahirannya, adalah gerakan politik. Seperti ditunjukkan oleh VSTP (*Vereeniging van Spooren en Tramweg Personeel* atau Perhimpunan Pekerja Trem dan Kereta Api), PBP (Perkumpulan Bumiputera Pabean), PPPB (Persatuan Pegawai Pegadaian Bumiputera), PFB (*Personeel Fabriek Bond* atau Himpunan Pekerja Pabrik) yang berdiri awal tahun 1900-an, watak politiknya sangat kuat. Konteks sosial kelahiran gerakan lah yang paling menentukan kuatnya watak politik gerakan buruh.

Awal abad ke-20, di Indonesia bangkit gerakan-gerakan sosial dengan ideologi gerakan yang plural. Sebagian ideologi itu bersumber pada nilai-nilai lokal, seperti *Kejawen*, Agama (Islam), dan Nasionalisme Lokal; dan sebagian lagi berasal dari Eropa, seperti Nasionalisme Sekuler, Sosialisme, Komunisme, serta perpaduan isme-isme tersebut yang dapat disimak pada pemikiran Semaun, Tan Malaka, Soekarno, dan Mohamad Hatta (Feith & Castles eds., 1988). Pembelahan sosial, baik vertikal maupun horizontal, yang disertai dengan ketimpangan ekonomi antar wilayah belum menjadi isu penting. Aneka perbedaan itu diikat oleh hadirnya musuh bersama, yakni kolonialisme Belanda yang nampak nyata di depan mata.

Selain persoalan di atas, kuatnya watak politik gerakan buruh juga dipengaruhi oleh kapitalisme negara, serta jenis kapitalisme yang tumbuh dan berkembang

di negeri ini (Robinson, 1986). Bagi rakyat Indonesia, tidak ada kekuatan lain yang telah memporak-porandakan struktur sosial-ekonomi selama satu abad terakhir, kecuali kapitalisme negara. Munculnya jenis kapitalisme ini memiliki arti penting, dimana buruh menemukan lawan politik jelas yang akan menjadi salah satu lawan gerakan mereka sepanjang sejarah.

Pada umumnya, perekonomian dikatakan bersifat kapitalistik ketika sebagian besar atau sejumlah porsi yang signifikan dari alat-alat produksi yang ada di dalamnya, seperti ladang pertanian, perkebunan, pabrik-pabrik, dan mesin-mesin, dimiliki oleh sektor swasta, bukan oleh pemerintah (Baumol, Litan & Schramm, 2010:115). Kapitalisme dan kolonialisme bisa menjadi kawan seiring. Seperti dikemukakan oleh Bill Warren (1980), kolonialisme merupakan pendorong banggunya kapitalisme di Dunia Ketiga. Kolonialisme bukanlah menghambat kapitalisme; sebaliknya, ia mempercepat integrasi ekonomi negara jajahan dengan pasar internasional (Warren, 1980:9). Proses ini berbeda dengan negara lain, sehingga respons buruh juga berbeda.

Kemajemukan kultural masyarakat Indonesia juga menyediakan lahan subur bagi pertumbuhan ideologi dan sistem gagasan. Gejala ini menjangkiti gerakan buruh. Usaha untuk membangun gerakan yang berbasis lapangan pekerjaan dan fokus pada gerakan ekonomi selalu kandas oleh pesona ideologi politik. Karena itu, gerakan buruh terus mengalami fragmentasi, kecuali di bawah rejim Soeharto yang melarang semua gerakan sosial (Rochadi, 2009a). Pemerintahan Soekarno, pada tahun 1960-an, pernah mencoba untuk menyatukan kemajemukan dalam formula NASAKOM (Nasionalis, Agama, dan Komunis) tetapi, baik tujuan maupun cara mencapai tujuan antara kekuatan kiri dan kanan yang berbeda tajam, berakhir dengan kerusuhan berdarah pada bulan Oktober 1965.

Dapat dipahami jika gerakan buruh yang muncul dan berkembang kemudian menjadi sporadis. Kemajemukan ideologis semacam ini menyulitkan dibangunnya konsensus. Dapat disimak, misalnya, gerakan buruh

mengusung ideologi agama Islam, seperti SARBUMUSI (Serikat Buruh Muslimin Indonesia), SBII (Serikat Buruh Islam Indonesia), dan GASBIINDO (Gabungan Serikat Buruh Islam Indonesia). Dari agama Kristen Protestan berkembang KESPEKRI (Kesatuan Pekerja Kristen Indonesia) dan SERBUKI (Serikat Buruh Kristen Indonesia). Manakala dari agama Kristen Katolik berkembang SOBP (Sentral Organisasi Buruh Pantjasila). Selain ideologi yang berbasis agama, juga muncul gerakan buruh dengan ideologi sekuler, seperti SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia), KBKI (Kesatuan Buruh Kerakyatan Indonesia), KBM (Kesatuan Buruh Marhaen), dan gerakan buruh yang bersifat kedaerahan (Rochadi, 2009a dan 2009b).

Ideologi *trabalismo* atau buruhisme, seperti yang berkembang di Amerika Latin, sulit dibangun di Indonesia, karena dalam politik para buruh (termasuk kelompok lain) akan kembali kepada identitas primer. Inilah penyebab penting kegagalan partai-partai buruh di negeri ini, meskipun jumlah buruh terus meningkat dan menjanjikan suara signifikan dalam PEMILU (Pemilihan Umum), tetapi gagal menempatkan wakilnya di parlemen. Kepentingan buruh seperti upah layak, keselamatan dan kesehatan kerja, jaminan sosial, perumahan, pendidikan anak-anak, dan jam kerja belum menjadi agenda bersama.

Menurut Ralf Dahrendorf (1986), dalam kondisi seperti itu buruh masih merupakan *quasi group* dan belum menjadi *interest group*. Agar menjadi *interest group*, gerakan buruh memerlukan tiga syarat, yaitu: kondisi teknis organisasi, kondisi politis, dan kondisi sosial (Dahrendorf, 1986)). Namun, terpenuhinya tiga syarat itu juga belum mampu mengantarkan gerakan buruh yang kuat. Dalam konteks ini, Bert Klandermans (2005) menekankan adanya satu syarat lagi yang lebih penting, yaitu kepemimpinan (Klandermans, 2005:55).

Belum munculnya tokoh nasional yang mampu mempersatukan kaum buruh dan belum terbangunnya ideologi *buruhisme*, juga menyumbang kepada sporadisnya gerakan buruh di Indonesia. Para aktivis

gerakan berkebangsaan Belanda, pada zaman dulu, lebih cenderung membangun gerakan yang mengejar tujuan ekonomi, seperti serikat guru, serikat postel (pos dan telekomunikasi), dan serikat pegadaian. Tetapi ketika kepemimpinan beralih ke tangan pribumi, pada pertengahan tahun 1920-an, hampir semua gerakan buruh menempuh jalur politik.

Suasana politik pada zaman kolonial itu, kemudian, ditandai dengan “berlomba nasionalis” dan menjadi motivasi yang kuat ke arah perubahan tersebut. Meskipun demikian, terjadi juga perpecahan yang didasarkan pada orientasi gerakan. VSTP (*Vereeniging van Spooren en Tramweg Personeel* atau Perhimpunan Pekerja Trem dan Kereta Api), yang memegang kepemimpinan gerakan, segera harus berhadapan dengan SI (Sarekat Islam). Gerakan terakhir ini pecah, ketika kekuatan buruh mulai menguasai gerakan. Kedua gerakan hasil perpecahan itu, yakni SI Merah dan SI Putih, lebih mengusung identitas di luar buruhisme, seperti agama Islam dan Komunisme (cf Kahin, 1952; Gani, 1984; Gie, 1992; dan Subekti, 2014).

Keinginan untuk membangun gerakan buruh yang tunggal dan kuat menjadi cita-cita oleh hampir semua tokoh buruh. Dalam pertemuan tokoh-tokoh buruh pada bulan Desember 1946, S.K. Trimurti (1975) mengingatkan pentingnya persatuan untuk membangun kekuatan. BBI (Barisan Buruh Indonesia) yang berdiri pada tahun 1945, dengan dukungan serikat-serikat buruh lain, kemudian berubah menjadi GASBI (Gabungan Serikat Buruh Indonesia). Tetapi, kesepakatan untuk hanya bergerak di bidang ekonomi ini diingkari sendiri oleh para tokoh buruh. Politik sebagai “panglima” dan konflik ideologi partai yang demikian tajam telah menyebabkan suatu Kabinet tidak berumur panjang pada tahun 1950-an; dan menggoda para aktivis buruh ikut-serta dalam usaha untuk mendapat kekuasaan (Trimurti, 1975).

Cairnya struktur politik juga memudahkan agensi untuk melakukan mobilitas vertikal. Konflik dalam tubuh GASBI, terutama antara gerakan ekonomi

Tabel 1:
Serikat Buruh dan Jumlah Anggota, 1957-1962

No	Serikat Buruh	Onderbouw	1957	1958	1962
1.	SOBSI	PKI	1,502,132	2,732,909	3,300,000*
2.	KBKI	PNI	100,758	1,001,775	1,617,000**
3.	SBII/GASBIINDO	MASYUMI	275,000	600,000	750,000***
4.	SOBRI	Partai Murba	43,842	281,000	--
5.	SOB Pantjasila	Partai Katholik	--	61,000	70,890****
6.	SARBUMUSI	Partai NU	11,950	12,050	26,300****

Keterangan: SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia); PKI (Partai Komunis Indonesia); KBKI (Kesatuan Buruh Kerakyatan Indonesia); PNI (Partai Nasionalis Indonesia); SBII/GASBIINDO (Serikat Buruh Islam Indonesia/Gabungan Serikat Buruh Islam Indonesia); MASYUMI (Majelis Syuro Muslimin Indonesia); SOBRI (Serikat Organisasi Buruh Republik Indonesia); SOB (Serikat Organisasi Buruh) Pantjasila; SARBUMUSI (Serikat Buruh Muslimin Indonesia); dan Partai NU (*Nahdlatul Ulama*).

Sumber: Untuk tahun 1957 dan 1958, diambil dari Kemenruh RI (1958:8).

** Bersumber dari J. Eliseo Rocamora (1991:434), data untuk tahun 1965.

*** Bersumber dari pernyataan Jusuf Wibisono dalam Pembentukan GASBIINDO pada tahun 1960, sebagaimana dikutip dalam I.N. Subagijo (1980:204).

**** Bersumber dari *Madjalah: Tindjauan Masalah-masalah Perburuhan*. Djakarta: Maret 1962, hlm.23.

atau gerakan politik, membawa perpecahan yang kemudian melahirkan GSBV (Gabungan Serikat Buruh Vertikal). Relasi antara buruh dan negara, yang telah bersemi sejak awal tahun 1920-an, dengan demikian kembali mengemuka dengan dibentuknya partai buruh dan bergabungnya serikat-serikat buruh kedalam partai politik. Para buruh membayangkan negara nasional yang berpihak kepada mereka, termasuk kepada petani dan rakyat kecil, yang oleh Soekarno disebut sebagai kaum *marhaen* (Soekarno, 2000; dan Saksono, 2008).

Sebelum terbentuknya partai-partai politik, hubungan buruh dengan negara dijembatani oleh gerakan buruh. Mulai dari VSTP, PFB, PPPB, GASBI, dan sampai dengan SOBSI, sejak awal telah mencita-citakan masyarakat Sosialis Indonesia di bawah pimpinan kaum buruh. Belakangan, SOBSI yang dimotori oleh SARBUPRI (Sarekat Buruh Perkebunan Republik Indonesia) secara tegas mencita-citakan masyarakat Komunis Indonesia. Sejarah hubungan antara buruh dan negara semacam ini selanjutnya menempatkan negara sebagai pihak yang terus dituntut dan digugat oleh kaum buruh (Rochadi, 2009a dan 2009b).

Transisi dari gerakan sosial ke partai politik yang berlangsung pada tahun

1940-an, khususnya setelah Indonesia merdeka, menegaskan identitas gerakan buruh sebagai gerakan politik. PBI (Partai Buruh Indonesia), misalnya, yang kurang mengaktualisasikan aspirasi buruh, mendorong lahirnya SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia). Karakter ideologis SOBSI merupakan idealisme para buruh, sehingga SOBSI mendapat dukungan luas. Ketika SOBSI menginduk pada PKI (Partai Komunis Indonesia) pada tahun 1960-an, partai lain ramai-ramai membuat serikat buruh sebagai *onderbouw* partai politik. Sampai tahun 1962, peta kekuatan serikat buruh adalah seperti nampak dalam tabel 1.

GERAKAN BURUH DAN KELANJUTAN DUALITAS

Gerakan buruh dualitas berbeda dengan teori gerakan buruh dualisme dari Salomon B. Levine (1963); atau gerakan buruh dualistik menurut H.W. Singer (1970). Menurut Salomon B. Levine, gerakan buruh di Jepang pasca Perang Dunia II (1939-1945) bersifat dualisme: gerakan buruh nasional terutama diarahkan kepada tujuan politik, yaitu mempengaruhi kebijakan publik melalui saluran-saluran politik; sedangkan serikat buruh lokal cenderung mengejar tujuan ekonomi

pekerja yang lebih pragmatis dan berjangka pendek dalam lingkungan perusahaan (Levine, 1963). Konsep ini memisahkan gerakan nasional dan gerakan lokal yang berbeda orientasi dan filosofinya. Sebagai federasi atau konfederasi, gerakan buruh di level nasional berjuang mendapatkan perlindungan melalui perundang-undangan atau peraturan pemerintah (Singer, 1970). Seringkali dilakukan bekerjasama dengan partai-partai politik.

Perjuangan serikat pekerja dilakukan secara total, sehingga memiliki daya tawar yang kuat. Di sini, perusahaan takut memberhentikan pekerja. Selain pekerja dipandang sebagai sumberdaya dan investasi, serikat pekerja juga menuntut loyalitas kuat kepada perusahaan. Setelah lebih dari setengah abad, format gerakan buruh di Jepang tidak berubah tajam (Levine, 1963). Perkembangan berlangsung dalam pasar tenaga kerja dualistik: antara industri besar dan industri kecil-menengah yang memperlebar kesenjangan (dalam Song, 2012). Perjuangan ekonomi di tingkat bawah disertai dengan perjuangan politik di tingkat nasional, dan melahirkan perbedaan upah yang sesuai dengan karakter perusahaan dan produktivitas kerja para buruh (Levine, 1963; dan Song, 2012).

Sedangkan menurut H.W. Singer (1970), gerakan buruh di negara berkembang merupakan gerakan dualistik karena ekonominya juga dualistik. Ia setuju dengan Julius H. Boeke (1953) tentang berlangsungnya sistem ganda di negara berkembang, dimana sektor modern ditandai dengan padat modal, berlangsung di kota-kota, dan diorientasikan untuk ekspor; sedangkan sektor tradisional ditandai dengan padat karya, berada di pedesaan, dan untuk konsumsi dalam negeri (Boeke, 1953; dan Singer, 1970). Sebagai konsekuensinya adalah bahwa di sektor modern, gerakan buruh cenderung menekankan tawar-menawar kolektif dalam memperbaiki kesejahteraannya. Sebaliknya di sektor tradisional, gerakan buruhnya menggunakan saluran politik, termasuk mobilisasi massa, dalam mengejar tujuannya. Dualisme dan dualistik antara

lain dibedakan oleh orientasi gerakan di level yang berbeda.

Elias T. Ramos (1978 dan 1982) setuju dengan pemikiran Sidney Webb & Beatrice Webb (1920), dan menggunakan konsep dualisme untuk menjelaskan hubungan perburuhan di Asia Tenggara. Menurutnya, kombinasi antara pelaksanaan fungsi politik dan fungsi ekonomi dilakukan secara serentak untuk mencapai peningkatan pendapatan dan jaminan sosial (*cf* Webb & Webb, 1920; and Ramos, 1978 dan 1982). Belum terungkap secara jelas tujuan dan motivasi politik gerakan buruh.

Konsep dualitas (*duality*), yang dikemukakan oleh Anthony Giddens (2003), bukan untuk menjelaskan gerakan sosial. Konsep ini digunakan oleh Anthony Giddens untuk menyelesaikan ketegangan yang terus berlangsung di kalangan ilmuwan sosial dalam menjelaskan fenomena sosial. Sebelum teori Anthony Giddens memperoleh pengakuan luas, ilmuwan sosial berada dalam dua kubu yang berhadapan antara agen dan struktur, antara subjektivisme dan objektivisme, serta antara voluntarisme dan determinisme. Ketegangan semacam ini merupakan dualisme. Kerancuan semacam itu disebabkan oleh cara pandang ilmuwan sosial dalam melihat objek kajian. Objek kajian ilmu sosial bukan peran, bukan struktur, bukan bagian, dan juga bukan totalitas, melainkan titik temu antara keduanya (*cf* Priyono, 2002; dan Giddens, 2003).

Logika Anthony Giddens (2003) dalam memposisikan struktur dan aksi (strukturasi) digunakan di sini untuk memahami gerakan buruh di Tanah Air. Poin penting yang disampaikan di sini adalah bahwa memahami gerakan buruh di Indonesia tidak bisa mengikuti cara pandang pemerintah Orde Baru (1966-1998), yang memaksa buruh untuk fokus pada gerakan ekonomi (Moertopo, 1975); ataupun cara pandang SBSI atau Serikat Buruh Republik Indonesia (Silaban, 2011). Juga tidak bisa mengikuti cara pandang politik aliran (Geertz, 1988); dan *onderbouw* model pemerintahan Orde Lama (Tedjasukmana, 1959; dan Edman, 2015), tetapi titik temu kedua kubu itu (Giddens, 2003).

Dengan kata lain, gerakan politik dan gerakan ekonomi merupakan dua sisi dari satu mata uang yang sama. Gerakan buruh yang sangat bermuatan politik hanya memperjuangkan kepentingan elite buruh dan tidak memberi manfaat berarti kepada buruh secara luas. Demikian pula gerakan yang menekankan aspek ekonomi akan sulit mencapai tujuan, karena keputusan-keputusan politik para elite tidak berpihak kepada buruh dan diperlukan perjuangan melalui jalur politik.

Konteks sosial lahirnya gerakan buruh telah membentuk gerakan yang kuat karakter politiknya. Sementara itu, proyek depolitisasi yang dilakukan oleh pemerintahan Soeharto (1966-1998) telah gagal mengajak buruh sebagai pekerja semata-mata, yang mengejar tujuan ekonomi. Setelah pemerintahan Soeharto jatuh, pada tahun 1998, terbuka struktur peluang politik atau *political opportunity structure*, meminjam konsep Sydney Tarrow (1996), tentang dualitas dalam gerakan buruh yang terus berlanjut.

Pada tahun 1999, terdaftar 68 serikat buruh tingkat nasional di Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia. Angka itu melonjak tajam menjadi 115 serikat buruh pada tahun 2002. Menyadari pentingnya gerakan yang kuat, berbagai serikat buruh bergabung dalam konfederasi. Hingga akhir tahun 2014, terdapat tiga konfederasi, yaitu: KSBSI (Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia), KSPSI (Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia), dan KSPI (Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia). Di samping itu, terdapat puluhan serikat buruh, baik gerakan yang murni dilakukan oleh buruh maupun LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang bergerak dalam bidang perburuhan. Kekuatan terakhir ini berperan penting dalam membangun kesadaran buruh, memasok gagasan, dan sebagai pioner gerakan buruh (Ford, 2009).

Selain watak politik gerakan buruh, pluralitas masyarakat dan terus berlangsungnya fragmentasi gerakan, dualitas dalam gerakan itu juga disumbang oleh berlangsungnya industrialisasi tanpa pendalaman. Pluralitas masyarakat

Indonesia termasuk sangat kompleks, karena geopolitik kepulauan dan menyebar. Negeri ini terdiri dari 13,466 pulau, yang terdaftar, dengan 1,128 suku bangsa (BPS, 2010). Tidak semua suku-suku itu memiliki adat yang bertahan secara turun-temurun.

Mr. Van Vollenhoven hanya mengelompokkan menjadi 19 lingkungan hukum adat atau *adatrechtskringen* (dalam Soekanto, 1981:15). Meskipun demikian, dampaknya terhadap tumbuhnya berbagai sistem gagasan dalam gerakan sosial sangat kompleks. Terdapat ratusan gerakan buruh lokal, baik yang mengusung nilai-nilai lokal dan agama maupun perpaduan antara lokal dan ideologi impor, seperti yang dapat ditemukan dalam SOBRI (Sentral Organisasi Buruh Republik Indonesia).

Di tingkat nasional, dijumpai gerakan buruh yang memperjuangkan nilai-nilai agama Islam. Namun buruh Muslim ini terpecah menjadi beberapa gerakan mengikuti mazhab mereka, seperti SBII (Serikat Buruh Islam Indonesia), GASBIINDO (Gabungan Serikat Buruh Islam Indonesia), SARBUMUSI (Serikat Buruh Muslim Indonesia), dan GOBSI (Gerakan Organisasi Buruh Syarekat Islam). Setelah pemerintah Orde Baru jatuh, pada tahun 1998, fragmentasi gerakan buruh dalam Islam juga terus berlanjut, yaitu dengan adanya PPMI (Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia), SERPI (Serikat Pekerja Islam), dan KOSBI (Kongres Buruh Islam). Gerakan yang berlindung dalam agama Kristen Protestan dan Katholik juga terpecah, demikian pula gerakan yang memperjuangkan *Marhaenisme* terbelah antara KBKI (Kesatuan Buruh Kerakyatan Indonesia) dan KBM (Kesatuan Buruh Marhaen).

Gerakan buruh militan menjelang tumbangnya pemerintah Orde Baru, seperti SBSI (Serikat Buruh Sejahtera Indonesia) dan FNPBI (Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia), tidak terbebas dari fragmentasi. SBSI terpecah menjadi 5 gerakan buruh baru dan FNPBI menjadi 3 gerakan buruh (Rochadi, 2009a). Meskipun fragmentasi gerakan sering kali tidak mewakili ideologi dan tidak sedikit karena ego para pemimpin

yang menolak kalah dalam suatu kongres, tetapi jelas menunjukkan lemahnya konsensus yang menggerogoti gerakan buruh.

Sesungguhnya fragmentasi bukan gejala yang tabu, karena juga berlangsung di negara industri. Niel M. Coe & David C. Joodhus-Lier (2010) mendeskripsikan fragmentasi buruh di Eropa sebagai dampak ekonomi globalisasi neo-liberal. Di era ini, gerakan buruh tradisional melemah dan pekerja lepas dari kelompok-kelompok berlangsung fragmentasi multidimensional, seperti tempat kerja terpisah-pisah, muncul majikan langsung dan tidak langsung, dan kontrak kerja individual (Coe & Joodhus-Lier, 2010). Di Bulgaria, seperti diungkapkan oleh John Thirkell, Richard Scase & Sarah Vickerstaff (2005), fragmentasi gerakan buruh merupakan konsekuensi masyarakat pasca otoriter. Pergeseran dan penyusunan kembali kelompok-kelompok politik akan diikuti oleh fragmentasi kelompok, termasuk serikat buruh (Thirkell, Scase & Vickerstaff, 2005).

Di negara industri maju, seperti Amerika Serikat, arah gerakan buruh lebih jelas, yaitu memperkuat serikat-serikat kerja berdasarkan lapangan kerja dan membangun, baik federasi maupun konfederasi dengan serikat kerja lapangan lainnya, untuk kepentingan politik. Dengan pola semacam ini, gerakan buruh, khususnya yang berbasis lapangan kerja, terus mengikuti perkembangan teknologi dan isu-isu pekerjaan. Pendalaman dan perluasan industri justru memperoleh dukungan dari serikat buruh, sebab menaikkan nilai ekspor yang berdampak pada peningkatan produksi dan pendapatan buruh.

Ketrampilan dan pendidikan para pekerja berimplikasi pada beban kerja, produktivitas kerja, dan pendapatan. Kontribusi tiap pekerja terhadap *output* perusahaan dikalkulasi dan prestasinya sangat mempengaruhi kariernya. Tetapi dalam mempertahankan kepentingan bersama, misalnya kebijakan pajak pendapatan, kebijakan jam kerja, kebijakan pensiun, jaminan sosial, dan proteksi perdagangan, diperjuangkan bersama oleh semua serikat buruh, karena akan berdampak pada kesejahteraan buruh.

Dualitas dalam gerakan buruh tidak bisa dipisahkan dari perkembangan industri tanpa pendalaman, sehingga isu-isu perburuhan tidak berkembang. Industrialisasi di negara berkembang, termasuk Indonesia, cenderung meluas sebagai respons tingginya *labor supply*, strategi perluasan meningkatkan dengan cepat pekerja industri (Mehta, 2012). Pertumbuhan pekerja di Indonesia sangat pesat selama masa industrialisasi, khususnya setelah kebijakan deregulasi pada tahun 1986 (BPS, 1988). Pada akhir tahun 2007, jumlah pekerja formal mencapai 28,520,000 orang (BPS, 2007); dan pada tahun 2014, sebanyak 40.19 persen dari total pekerja 118.2 juta orang (BPS, 2014). Dari jumlah ini, 80 persen bekerja di industri ringan.

Jumlah buruh yang demikian besar bekerja pada klasifikasi industri yang sama, isu-isu yang berkembang di kalangan buruh hanyalah soal upah bulanan, upah lembur, THR (Tunjangan Hari Raya), potongan, cuti, dan jaminan sosial. Isu-isu seperti ini sangat ringan dan tidak mencerdaskan buruh. Idealnya, isu-isu buruh berhubungan dengan pekerjaan, perkembangan teknologi, dan pengembangan sumberdaya manusia. Isu demikian itu tidak muncul, karena industrialisasi tidak disertai dengan pendalaman yang menunjukkan terus meningkatnya penggunaan teknologi dan produksi (Rochadi, 2014a).

Di industri ringan, upah buruh senior dan junior tidak berbeda jauh. Perbedaan hanya disebabkan oleh masa kerja dan tanggungan keluarga. Itu pun semua buruh perempuan dihitung lajang. Akibatnya, upah menjadi isu utama dan realisasinya memerlukan tekanan buruh kepada pemerintah, baik di Pusat maupun di Daerah.

Dualitas gerakan buruh di Indonesia berlangsung di semua level, mulai dari tingkat perusahaan sampai nasional. Di tingkat perusahaan, gerakan buruh mengontrol dipatuhinya keputusan-keputusan pemerintah dalam hal upah dan jaminan sosial. Mencegah pemutusan hubungan kerja, memastikan dibayarnya THR dan pesangon, serta mengontrol iuran ke serikat buruh. Jika dalam suatu

perusahaan terdapat lebih dari satu serikat buruh, gerakan berperan menegosiasi untuk dibuatnya KKB (Kesepakatan Kerja Bersama).

Fragmentasi gerakan buruh telah dimanfaatkan oleh pengusaha untuk menunda pembentukan KKB atas dasar alasan "dengan serikat buruh yang mana KKB akan dibuat?". Selain itu, serikat buruh juga menegosiasi agar anggotanya diizinkan mengikuti pelatihan, pendidikan, dan bahkan melakukan pemogokan. Di tingkat perusahaan ini, keberadaan lebih dari satu serikat buruh lebih menguntungkan pengusaha, selain persoalan KKB di atas juga satu sama lain dapat diadu untuk saling melemahkan posisinya. Dalam mengisi jabatan managerial, misalnya, pengusaha cenderung memilih mereka yang tidak tergabung dalam serikat buruh, minimal memilih orang yang lebih akomodatif.

Sampai akhir tahun 2014, belum tumbuh serikat buruh lapangan pekerjaan yang kuat di semua level, mulai dari perusahaan-perusahaan, cabang hingga ke pusat. Lingkungan ekonomi-politik belum akomodatif terhadap gerakan buruh semacam itu. Pengusaha juga menggunakan berbagai cara untuk mencegah gerakan buruh yang kuat dan efektif, seperti menyewa para preman dan *jawara* (jagoan) untuk mengawasi buruh. Gerakan buruh militan, *genuine*, dan efektif akan secara resmi disamakan dengan ancaman munculnya kembali Komunisme di Indonesia.

KESIMPULAN

Konsep dualitas mampu menjelaskan perilaku gerakan buruh di Indonesia. Gerakan buruh di Indonesia, baik di pusat maupun di daerah, mengejar kepentingan ekonomi dan kepentingan politik sekaligus. Meskipun hampir 30 tahun terus-menerus didorong untuk hanya bergerak di sektor ekonomi, tetapi tetap tidak mampu meninggalkan gerakan politik. Kuatnya gerakan politik ini, antara lain, karena sejarah kelahiran gerakan buruh, kepeloporan gerakan buruh dalam gerakan nasional kemerdekaan, dan kepeloporannya

dalam membuka keran demokrasi menjelang jatuhnya pemerintahan Soeharto pada tahun 1998.

Dualitas dalam gerakan buruh pasca Orde Baru terus berlanjut, selain watak politik dari gerakan buruh, pluralitas masyarakat, kelangsungan fragmentasi gerakan buruh, dan yang tidak kalah penting adalah berlangsungnya industrialisasi tanpa pendalaman teknologi. Kondisi terakhir ini menyebabkan isu-isu gerakan tidak berkembang dan hanya mempersoalkan kebutuhan sehari-hari, seperti upah, uang lembur, THR (Tunjangan Hari Raya), dan transportasi.

Gerakan buruh, selain memperjuangkan kesejahteraan para buruh, yang tidak kalah penting adalah isu pekerjaan dan perkembangan teknologi. Karena itu, kebijakan industri perlu mengarah ke pendalaman, bukan terus pelebaran. Arah kebijakan industri yang demikian menuntut sumber daya manusia yang terus meningkat dan kompetitif dalam menghadapi persaingan global.

Fakta menunjukkan bahwa di perusahaan-perusahaan yang padat modal dengan SDM (Sumber Daya Manusia) *high skill*, tidak menghadapi pemogokan dan tuntutan pembayaran upah, sesuai standar UMK (Upah Minimum Kota/Kabupaten). Bahkan, upah pekerja di industri padat modal rata-rata lebih tinggi dibanding besaran UMK. Pekerja dengan *skill* rendah cenderung melakukan gerakan ke sasaran politik dan menjadikan negara sebagai sasaran. Oleh karena itu, serikat pekerja perusahaan sejenis perlu menggalang kekuatan untuk menuntut upah berdasarkan lapangan pekerjaan, sehingga produktivitas kerja diperhitungkan dalam penentuan kebijakan pengupahan.¹

¹*Pernyataan:* Dengan ini saya menyatakan bahwa artikel ini merupakan hasil penelitian dan karya akademik saya sendiri. Ianya bukan hasil dari kegiatan plagiat. Sumber-sumber yang saya kutip, jelas tercantum dalam Referensi. Artikel tersebut secara keseluruhan atau sebagian juga belum pernah dipublikasikan atau disampaikan kepada jurnal ilmiah lainnya.

Referensi

- Baumol, William J., Robert E. Litan & Carl J. Schramm. (2010). *Good Capitalism, Bad Capitalism: Kapitalisme Baik, Kapitalisme Buruk, dan Ekonomi Pertumbuhan dan Kemakmuran*. Jakarta: Gramedia, Terjemahan.
- Boeke, Julius H. (1953). *Economics and Economic Policy of Dual Societies as Exemplified by Indonesia*. New York: Institute of Pacific Relations.
- BPS [Badan Pusat Statistik]. (1988). *Statistik Industri 1986: Hasil Pengolahan Perusahaan Industri Besar dan Sedang*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- BPS [Badan Pusat Statistik]. (2007). *Survey Tahunan Perusahaan Industri Pengolahan 2007*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- BPS [Badan Pusat Statistik]. (2010). *Sensus Penduduk*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- BPS [Badan Pusat Statistik]. (2014). *Statistik Indonesia 2014*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Breman, Jan. (1997). *Menjinakkan Sang Kuli: Politik Kolonial pada Awal Abad ke-20*. Jakarta: Grafiti Press, Terjemahan.
- Burke, Peter. (2003). *Sejarah dan Teori Sosial*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Terjemahan.
- Coe, Niel M. & David C. Joodhus-Lier. (2010). "Re-Embedding the Agency of Labour" dalam Ann Cecilie Bergene, Sylvi B. Endresen & Hege Merete Knutsen [eds]. *Missing Link in Labour Geography: The Dynamic of Economic Space*. Surrey: Ashgate Publishing.
- Dahrendorf, Ralf. (1986). *Konflik dan Konflik dalam Masyarakat Industri*. Jakarta: Rajawali Pers, Terjemahan.
- Deyo, F. (1989). *Beneath the Miracle: Labor Subordination in the New Asian Industrialism*. Berkeley: University of California Press.
- Dunlop, John. (1944). *Wage Determination Under Trade Union*. New York: Macmillan.
- Edman, Peter. (2015). *Komunisme a la Aidit: Kisah Partai Komunis Indonesia di Bawah Kepemimpinan D.N. Aidit, 1950-1965*. Yogyakarta: Penerbit Narasi, Terjemahan.
- Feith, Herbert & Lance Castles [eds]. (1988). *Pemikiran Politik Indonesia, 1945-1965*. Jakarta: Penerbit LP3ES, Terjemahan.
- Ford, Michele. (2009). *Workers and Intellectuals: NGOs, Trade Unions, and the Indonesian Labour Movement*. Singapore: Singapore University Press, Hawaii University Press, and KITLV Press.
- Ford, Michele. (2014). "Learning by Doing: Trade Unions and Electoral Politics in Batam, Indonesia, 2004-2009" dalam *South East Asia Research*, Vol.22(3), hlm.341-357.
- Gani, M.A. (1984). *Cita Dasar & Pola Perjuangan Syarikat Islam*. Jakarta: Penerbit Bulan Bintang.
- Geertz, Clifford. (1988). *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*. Jakarta: Pustaka Jaya, Terjemahan.
- Giddens, Anthony. (2003). *Teori Strukturasi untuk Analisis Sosial*. Pasuruan: Penerbit Pedati, Terjemahan.
- Gie, Soe Hok. (1992). *Di Bawah Lentera Merah*. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.
- Henselin, James M. (2006). *Sosiologi dengan Pendekatan Membumi*. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, Terjemahan.
- Ingleson, John. (2004). *Tangan dan Kaki Terikat: Dinamika Buruh, Sarekat Buruh, dan Perkotaan Masa Kolonial*. Jakarta: Komunitas Bambu, Terjemahan.
- Jackson, Karl D. (1990). *Kewibawaan Tradisional, Islam, dan Pemberontakan: Kasus Darul Islam Jawa Barat*. Jakarta: Grafiti Pers, Terjemahan.
- Juliawan, Benny Hari. (2011). "Street-Level Politics: Labour Protest in Post-Authoritarian Indonesia" dalam *Journal of Contemporary Asia*, Vol.41(3), hlm.349-370.
- Kahin, George McTurnan. (1952). *Nationalism and Revolution in Indonesia*. Ithaca, New York: Cornell University Press.
- Kemenruh RI [Kementerian Perburuhan Republik Indonesia]. (1958). *Tinjauan Masalah Perburuhan: Bulan Mei*. Djakarta: Kementerian Perburuhan Republik Indonesia.
- Kerr, Clark et al. (1960). *Industrialism and Industrial Man: The Problem of Labor and Management in Economic Growth*. California: Harvard University Press.
- Klandermans, Bert. (2005). *Protes dalam Kajian Psikologi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Terjemahan.
- Layendecker, L. (1983). *Tata, Perubahan, dan Ketimpangan: Suatu Pengantar Sejarah Sosiologi*. Jakarta: PT Gramedia.
- Lenin, Vladimir. (1902). *What is to Be Done?* Moscow: Lenin Selected Works, transcription by Tim Delaney.
- Lerner, Daniel. (1983). *Memudarnya Masyarakat Tradisional*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, Terjemahan.
- Levine, Salomon B. (1963). "Japanese Trade Unionism as a Model in Economic Development" dalam E.M. Kassalow [ed]. *National Labor Movement in the Postwar World*. n.c. [no city]: North-Western University Press, hlm.195-203.
- Madjalah: Tinjauan Masalah-masalah Perburuhan*. Djakarta: Maret 1962.
- Marx, Karl. (1990). *Capital: Critique of Political Economy, Volume 1*. New York: Penguin Books, firstly published in 1867.
- Mehta, Swati. (2012). "Structural Transformation and Industrialization: A Panel Analysis of Indian Manufacturing Industries" dalam *The Journal of Comparative Asian Development*, Vol.11(1), hlm.152-194.
- Mintz, Jeanne S. (2002). *Muhammad, Marx, Marhaen: Akar Sosialisme Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Terjemahan.
- Mizuno, Kosuke. (2014). "Globalization and Labor Policy as well as Organized Labor in Indonesia" dalam *The Journal of Social Policy and Labor Studies*, Vol.8, hlm.363-378.
- Moertopo, Ali. (1975). *Buruh dan Tani dalam Pembangunan*. Jakarta: Penerbit CSIS.
- Perlman, Selig. (1928). *A Theory of the Labor Movement*. New York: Macmillan.
- Priyono, B. Herry. (2002). *Anthony Giddens: Suatu Pengantar*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

- Ramos, Elias T. (1978). "Trade Union and Filipino Society" dalam Everett M. Kassalow & Ukandi G. Damachi [eds]. *The Role of Trade Union in Developing Societies*. Geneva: ILO [International Labour Organization].
- Ramos, Elias T. (1982). "Strategi Hubungan Perburuhan Asia Tenggara: Analisis Perbandingan" dalam *Prisma*, Th.XI, No.12 [Desember], hlm.38-47.
- Robinson, Richard. (1986). *Indonesia: The Rise of Capital*. Sydney: Allen and Unwinn.
- Rocamora, J. Eliseo. (1991). *Nasionalisme Mencari Ideologi*. Jakarta: Grafiti Pers, Terjemahan.
- Rochadi, Sigit. (2009a). "Fragmentasi dan Kelemahan Gerakan Buruh di Indonesia Pasca Orde Baru". *Disertasi Doktor Tidak Diterbitkan*. Surabaya: FISIP UNAIR [Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga].
- Rochadi, Sigit. (2009b). "Transisi ke Kapitalisme sebagai Arena Gerakan Sosial: Kasus Indonesia" dalam *Bumantara*, Vol.1(1), hlm.1-12.
- Saksono, Ignatius Gatut. (2008) *Marhaenisme Bung Karno*. Jakarta: Rumah Belajar Yabinkas.
- Sandra. (1961). *Sedjarah Pergerakan Buruh di Indonesia*. Djakarta: Pustaka Rakjat.
- Scott, James C. (2000). *Senjatanya Orang-Orang yang Kalah: Bentuk-bentuk Perlawanan Sehari-hari Kaum Tani*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Terjemahan.
- Shiraishi, Takashi. (1997). *Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa, 1912-1926*. Jakarta: Grafiti Pers, Terjemahan.
- Silaban, Rekson. (2011). *Repositioning the Labor Movement: Road Map the Indonesian Labor Movement After Reformasi*. Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung.
- Singer, H.W. (1970). "Dualism Revisited: A New Approach to the Problems of Dual Society in Developing Countries" dalam *The Journal of Development Studies*, Issue of October, hlm.60-15.
- Soekanto, Soerjono. (1981). *Pokok-pokok Hukum Adat*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Soekarno. (2000). *Marhaenisme*. Jakarta: Promedia.
- Song, Jeyeoun. (2012). "Economic Distress, Labor Market Reforms, and Dualism in Japan and Korea" dalam *Governance*, Vol.25(3), hlm.415-438.
- Subagjo, I.N. (1980). *Jusuf Wibisono: Karang di Tengah Gelombang*. Jakarta: Gunung Agung.
- Subekti, Valina Singka. (2014). *Partai Syarikat Islam Indonesia: Kontestasi Politik hingga Konflik Kekuasaan Elit*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Tarrow, Sydney. (1996). *Power in Movement: Social Movement, Collective Action, and Mass Politics in the Modern State*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Tedjasukmana, Iskandar. (1959). *The Political Character of the Indonesian Trade Union Movement*. Ithaca, New York: Cornell Modern Indonesia Project.
- Thirkell, John, Richard Scase & Sarah Vickerstaff. (2005). *Labour Relation and Political Change in Eastern Europe*. London: Taylor and Francis.
- Trimurti, S.K. (1975). *Hubungan Pergerakan Buruh Indonesia dengan Pergerakan Kemerdekaan Nasional*. Jakarta: Yayasan Idayu.
- Warren, Bill. (1980). *Imperialism: Pioneer of Capitalism*. London: New Left Books.
- Webb, Sidney & Beatrice Webb. (1920). *The History of Trade Unionism*. Boston: American Economic Association.



Gerakan Buruh di Indonesia

(Sumber: <http://fpbijogja.blogspot.co.id>, 28/2/2016)

Konsep dualitas mampu menjelaskan perilaku gerakan buruh di Indonesia. Gerakan buruh di Indonesia, baik di pusat maupun di daerah, mengejar kepentingan ekonomi dan kepentingan politik sekaligus. Meskipun hampir 30 tahun terus-menerus didorong untuk hanya bergerak di sektor ekonomi, tetapi tetap tidak mampu meninggalkan gerakan politik. Kuatnya gerakan politik ini, antara lain, karena sejarah kelahiran gerakan buruh, kepeloporan gerakan buruh dalam gerakan nasional kemerdekaan, dan kepeloporannya dalam membuka keran demokrasi menjelang jatuhnya pemerintahan Soeharto pada tahun 1998.